

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Halim Hamzah dan Kemal Redindo Syahrul Putera. 2009. *Cara-cara Praktek Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- HAW. Widjaja, 2004, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Riwu Kaho, 2003, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Bima Aksara, Jakarta;
- Koswara, E. (2001). *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Jakarta: Yayasan Pariba.
- Kushandajani. (2008). *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Sosio Legal*. Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP.

### B. Dokumen

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Bupati Bekasi Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.
- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
- Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD.
- Permendagri Nomor 111 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.

### C. Jurnal

Ali Fauzan, S.H.I, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam menyusun dan Menetapkan Peraturan Desa di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes”.

Wulandari Agustyarna skripsinya yang berjudul “Proses Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)

Erga Yuhandra Journalnya yang berjudul “Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislatif (Sebuah Telaah Sosiologis Proses Pembentukan Perdes di Desa Karamatwangi, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan).”

Fauzan, Ali (2010) dengan judul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa terkait dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa.

Hindun Shabrina dkk (2012) tentang Kajian Yuridis Mengenai Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa.

Noviar Satriadi (2013) tentang Pengaruh Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan desa dengan keluarnya UU NO.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Di Kecamatan Praya Barat).

Fauzan Ali tahun 2010, Penelitian berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa terkait dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa”.

Noviar Satriadi (2013) dengan judul “Pengaruh Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan desa dengan keluarnya UU NO.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”.

Gunadi, (2019), Peran Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019”.